

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan hidup Papua diakui selama tiga puluh sembilan tahun, masih bersifat egos-sektual dan eksploitatif, serta belum mengarah dan menerapkan *the best sustainable resource management practice principles*. Strategi dan arahan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup Papua selama ini belum seimbang dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam yang terkendali dan pengelolaan lingkungan hidup Papua yang ramah lingkungan menjadi modal dasar dan sasaran yang sangat penting bagi pembangunan Papua.

Optimalisasi Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat dicapai jika didukung dengan berbagai program dan kegiatan, SDM dan sarana serta prasarana yang terukur dan akuntabel.

Asas Akuntabilitas adalah salah satu aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Sistem AKIP). Substansi dari system AKIP adalah penyelarasan antara peencanaan dan realisasi dengan orientasi kepada hasil. Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan Rencana Strategi dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kerja Tahunan atau penetapan kinerja yang merupakan kontrak kinerja serta laporan pertanggungjawaba kinerja tiap tahun. Pengukuran kinerja sebagai implementasi dari pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 pada dasarnya merupakan tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban meliputi perencanaan, pengukuran, pelaksanaan dan pelaporan sebagai siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus sebagai penilaian atas presentasi/keberhasilan atau kegagalan visi, misi organisasi yang tertuang dalam RENSTRA SKPD

Untuk mengukur Kinerja suatu unit Organisasi sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2004 lebih mendekat kepada sistem Akip setelah melalui perencanaan dalam membandingkan kajian antara perencanaan Realisasi dan Sasaran dengan menggunakan indikator input, output, outcome dalam mencapai target indikator pada hasil. Penyusunan Akuntabilitaas Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai informasi atas capaian kinerja instansi atau SKPD.

1.2. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 7 November 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua, merupakan unsur wajib lingkungan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur .

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan kewenangan kepada Daerah melalui Otonomi Khusus yang luas dan bertanggungjawab mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan memperhatikan karakteristik daerah dan kebutuhan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Memperhatikan ciri khas tersebut diatas sejalan dengan Pemberlakuan UU No. 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 sebagai dasar utama penyusunan perangkat daerah karena adanya urusan yang perlu ditangani, yakin dengan adanya urusan wajib dan urusan pilihan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua melaksanakan tugas pokok melaksanakan urusan lingkungan hidup dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur. Dalam melaksanakan tugasnya BPLH Provinsi Papua menyelenggarakan fungsi :

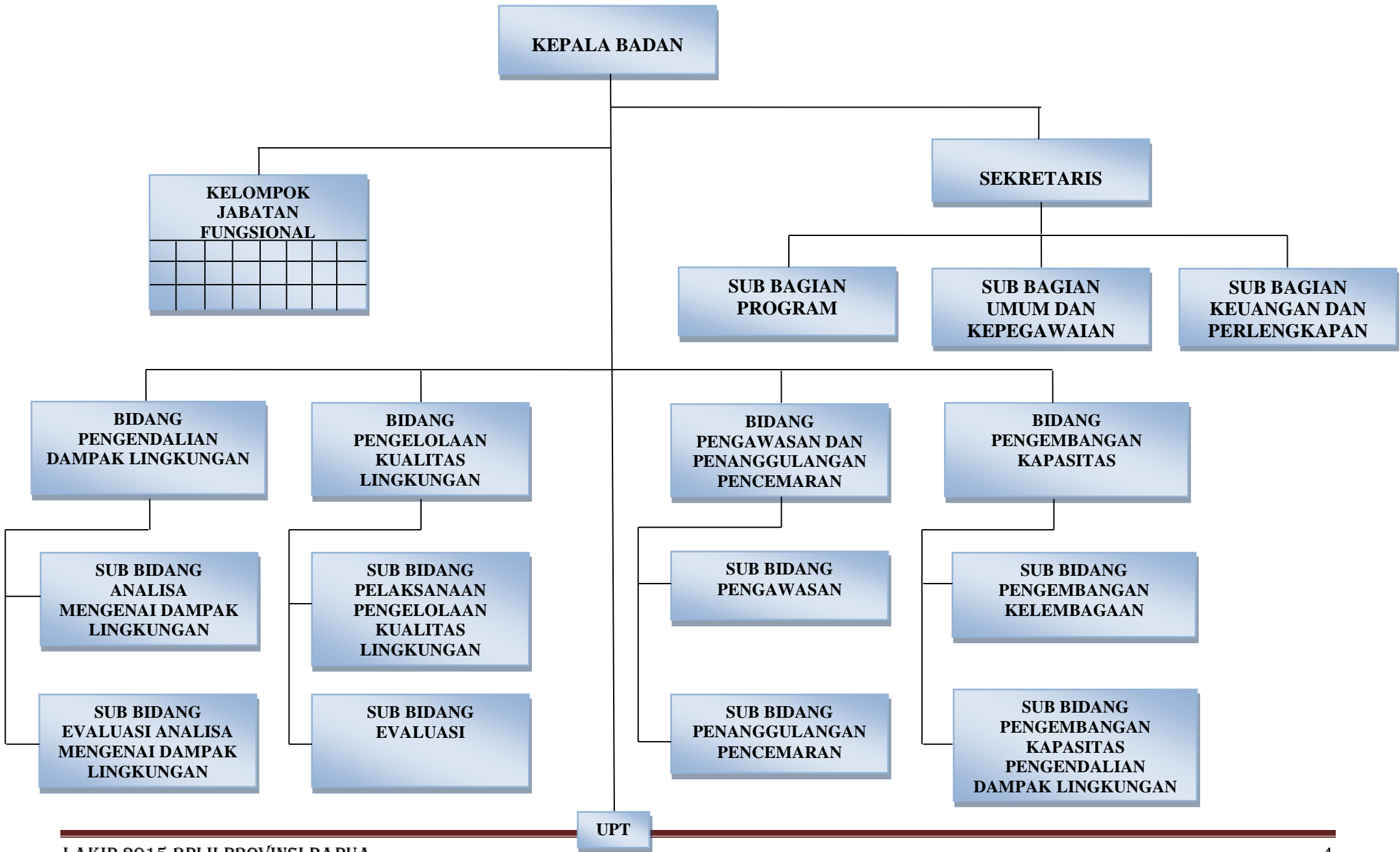
- a. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup
- b. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Lingkungana Hidup
- c. Pelaksanaan Ketatausahaan Badan; dan
- d. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas perlu ada fungsi yang telah ditetapkan, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua memiliki Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Nomor 13 Tahun 2013 yaitu:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
 2. Sub Bidang Evaluasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
- d. Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pelaksanaan Pengelolaan Kualitas Lingkungan
 2. Sub Bidang Evaluasi
- e. Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pengawasan
 2. Sub Bidang Penanggulangan Pencemaran
- f. Bidang Pengembangan Kapasitas, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan
 2. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pengendalian Dampak Lingkungan
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua selengkapnya digambarkan sebagai berikut:



1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Lingkungan Hidup Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Berikut:

Bab I- Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan dan struktur organisasi;

BAB II- Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2015 meliputi RPJMD 2014-2018, Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Tahun 2014-2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015

BAB III- Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua dikaitkan dengan pertanggungjawaban public terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2015.

BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. RPJMD 2014-2018

2.1.1. Visi dan Misi Gubernur Terpilih

1. Visi

Sejalan dengan prioritas pembangunan tahap kedua RPJPD Provinsi Papua tahun 2005-2025, visi dan misi pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2013-2018, serta permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan Provinsi Papua, maka kondisi masa depan yang diharapkan terwujud periode 5 (lima) tahun kedepan adalah: “PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA”.

2. Misi

Berdasarkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Suasana Aman, Tenram dan Nyaman bagi seluruh masyarakat di Papua dalam kedaulatan NKRI.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan Otonomi Khusus
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berakhlak Mulia.
4. Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal
5. Percepatan Konektivitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antara Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedepankan Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Papua tahun 2014-2018 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua akan mendukung terlaksananya visi dan misi Gubernur terutama di Misi Keempat dan Kelima : Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal dan Percepatan Konektivitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antara Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedepankan Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

3. Tujuan dan Sasaran dari Misi Keempat ini adalah:

TUJUAN	SASARAN
1. Membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berkelanjutan di seluruh Papua berbasis ekonomi lokal yang mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif 2. Tercapainya stabilitas makro ekonomi 3. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 4. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah 5. Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah 6. Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja 7. Terselenggaranya promosi potensi kepariwisataan daerah.
2. Menciptakan pengelolaan SDA secara terpadu dgn memperhatikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan perekonomian masyarakat. 2. Meningkatnya pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat

4. Tujuan dan Sasaran dari Misi Kelima ini adalah:

TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dalam mendukung pengembangan wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah 2. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah 3. Meningkatnya jangkauan pelayanan system komunikasi dan informasi antar wilayah 4. Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni 5. Meningkatnya pemenuhan air bersih 6. Meningkatnya pemenuhan energy murah dan ramah lingkungan
2. Terwujudnya Pembangunan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten. 2. Terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia 3. Kepatuhan setiap pemanfaatan ruang terhadap proses perizinan lingkungan 4. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan oleh pemangku kepentingan

2.2.Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2014-2018

2.2.1. Pengertian dan Fungsi Renstra

Renstra merupakan rencana kerja dan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sesuai tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Renstra menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) secara sistematis memuat indikasi program setiap tahun.

Untuk mendukung target yang ingin dicapai Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua tahun 2014 – 2018, dan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup, maka pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Papua perlu menyusun Rencana Strategis Pengelola Lingkungan Hidup Papua untuk memberikan arah pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup Provinsi Papua jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua 2014 – 2018 berpodaman pada program-program yang telah digariskan dan tertuang pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua 2014 – 2018 dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip partisipatif, transparan dan responsif, dan mengacu kepada pedoman penyusunan Rencana Strategis kementerian/Lembaga yang diterbitkan oleh Lembaga Atministrasi Negara (LAN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua, UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan UU No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2.2.2. Visi

Sejalan dengan perkembangan pembangunan di Papua saat ini serta memperhatikan potensi dan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Gubernur Papua selama 5 (lima) tahun kedepan (2014-2018), maka Visi Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua Tahun 2014-2018 adalah:

“ BPLH Provinsi Papua proaktif dan berperan mendukung Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Adat menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera”

2.2.3. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkan Misi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua sebagai berikut:

1. Menerapkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan;
2. Membangun perencanaan dan koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup antar pemangku kepentingan dengan menerapkan kaidah good governance;
3. Mewujudkan manfaat ekonomi lingkungan Hidup bagi kehidupan masyarakat dan penguatan kapasitas fiskal Papua secara berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam mengelola lingkungan hidup
5. Mendorong peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan hidup (daya tampung dan daya dukung);
7. Mengembangkan sistem manajemen dan informasi lingkungan hidup.
8. Mewujudkan Papua sebagai paru-paru dunia dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

2.2.4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan strategis yang ingin dicapai BPLH Provinsi Papua Tahun 2014-2018 sesuai

Visi dan Misi tersebut di atas adalah:

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Menerapkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan	Terwujudnya pengelolaan SDA secara terpadu dgn Memperhatikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan dan penegakan hukum	1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan 2. Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup untuk kelayakan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya 3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi Lingkungan hidup 4. Meningkatkan upaya penataan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pelanggar aturan lingkungan atau pelaku pencemaran lingkungan hidup
2.	Membangun perencanaan dan koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup antar pemangku kepentingan dengan menerapkan kaidah good governance.	Terwujudnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pengelolaan lingkungan hidup	Membangun koordinasi perencanaan yang strategis antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup
3.	Mewujudkan manfaat ekonomi lingkungan Hidup bagi kehidupan masyarakat dan penguatan kapasitas fiskal Papua secara berkeadilan dan berkelanjutan	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui upaya pemberdayaan masyarakat adat	Peningkatan ekonomi masyarakat adat berbasis potensi SDA dan lingkungan hidup
4	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Terwujudnya pembinaan dan penguatan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup
5	Mendorong peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup melalui partisipasi aktif masyarakat adat	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup
6	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan hidup (daya tampung dan daya dukung).	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan
7	Mengembangkan sistem manajemen dan informasi lingkungan hidup.	Terwujudnya sistem informasi lingkungan hidup (SI Lingkungan Hidup) yang akurat dan mutakhir	Meningkatnya kualitas data melalui sistem informasi lingkungan hidup (SI Lingkungan Hidup)
8	Mewujudkan Papua sebagai paru-paru dunia dalam penurunan emisi gas rumah kaca.	Terwujudnya penurunan emisi gas rumah kaca	Meningkatnya serapan karbon
9.	Mewujudkan Profesionalisme Aparatur serta Disiplin Aparatur	Terwujudnya profesionalisme aparatur dan disiplin aparatur	Meningkatnya profesionalisme aparatur serta disiplin aparatur

2.2.5. Strategi dan Kebijakan

Adapun strategi untuk mencapai misi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

No	MISI	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Menerapkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan lingkungan terhadap sumber pencemar 3. Meningkatkan informasi lingkungan hidup 4. Meningkatkan pelayanan public terhadap pengelolaan lingkungan hidup 5. Meningkatkan penerapan sanksi hukum bagi pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 	<p>Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatkan kapasitas laboratorium Lingkungan Hidup <p>Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan hidup.</p> <p>Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam SI Lingkungan Hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan penegakan hukum lingkungan 2. Pembentukan pos-pos pengaduan 3. Peningkatan kapasitas SDM PPLHD dan PPNS 4. Penyebarluasan informasi hukum kepada pemangku kepentingan 5. Penyusunan Perdasi/Perdasus Pengelolaan Lingkungan Hidup
2	Membangun perencanaan dan koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup antar pemangku kepentingan dengan menerapkan kaidah good governance.	Meningkatkan kerjasama antar pemerintah dan pemangku kepentingan dalam perencanaan pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengelolaan lingkungan hidup antara pemda dan pemangku kepentingan
3	Mewujudkan manfaat ekonomi lingkungan Hidup bagi kehidupan masyarakat dan penguatan kapasitas fiskal Papua secara berkeadilan dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Investasi Hijau yang berpihak pada masyarakat adat; 2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup 2. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan SDA dan lingkungan hidup serta jasa lingkungan 3. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui Pengelolaan Produk Lokal <p>Pembentukan kelompok pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan</p>
4	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan Hidup	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Lingkungan Hidup di Prov. Papua melalui Pembentukan Badan Lingkungan	Mendorong terbentuknya instansi Lingkungan Hidup di kabupaten/kota sebagai urusan wajib

		Hidup, pengembangan SDM melalui diklat/bimtek/kursus dan studi banding dibidang Lingkungan Hidup. 2. Peningkatan sapras pengendalian dampak lingkungan.	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
5	Mendorong peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan pemulihan dan pelestarian SDA dan Lingkungan Hidup	1. Pembentukan kelompok masyarakat mitigasi dan adaptasi. 2. Pembentukan kelompok kehati, 3. Pembentukan kaukus lingkungan.
6	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan hidup (daya tampung dan daya dukung).	1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Dampak usaha dan/atau kegiatan 2. Meningkatkan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
7	Mengembangkan sistem manajemen dan informasi lingkungan hidup.	Meningkatkan pelayanan public dan akses informasi melalui sistem informasi lingkungan hidup (SILH)	Keterbukaan informasi lingkungan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat
8	Mewujudkan Papua sebagai paru-paru dunia dalam penurunan emisi gas rumah kaca.	Menginventarisasi penghasil emisi sektor AFOLU, Transportasi, Energi dan Pengelolaan limbah	Perhitungan hasil emisi sector AFOLU, Transportasi, Energi dan Pengelolaan limbah
9	Mewujudkan Profesionalisme Aparatur serta Disiplin Aparatur	Mewujudkan reformasi biro krasid dan peningkatan tata kelola pemerintahan	Tertib administrasi, transparansi dan akubntable

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Papua 2013-2018 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua akan mendukung terlaksananya visi dan misi Gubernur terutama di Misi Keempat dan Kelima : Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal dan Percepatan Konektivitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antara Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedepankan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

2.2.6. Sasaran Strategis

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1: Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2014-2018

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (Th. 2014)	TARGET AKHIR (Th. 2018)
1	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan	Persentase perusahaan yang taat Pengelolaan Lingkungan	Dunia usaha	2	22
2	Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup untuk kelayakan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya	Tingkat Kualitas Udara Ambien memenuhi baku mutu	Tren kualitas udara	12	12
3		Tingkat Kualitas Air yang memenuhi kualitas baku mutu	Tren kualitas air	18	18
4	Meningkatkan upaya penataan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pelanggaran aturan lingkungan atau pelaku pencemaran lingkungan hidup	Jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah kasus pengaduan yang ditindak lanjuti	1	15
5		Jumlah pos pengaduan yang dibentuk dalam masyarakat adat	Jumlah pos	1	29
6	Membangun koordinasi perencanaan yang strategis antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah dokumen perencanaan	dokumen	3	3
7	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup melalui peran serta masyarakat adat	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif menjaga lingkungan	Jumlah Kelompok	21	56
8	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup	Jumlah laboratorium lingkungan yang terakreditasi	Jumlah laboratorium	1	3
9	Meningkatnya pengendalian pengelolaan LH pada dunia usaha	Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang mendapatkan ijin lingkungan	Jumlah ijin lingkungan	8	30

2.2.7. Program dan Kegiatan

Program prioritas bidang lingkungan hidup Provinsi Papua yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2014-2018 ditetapkan ada 10 program program prioritas, sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Kantor

Indikator kinerja program lancarnya urusan administrasi perkantoran

Kelompok sasaran: Aparatur

Kegiatan yang akan dilaksanakan:

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9. Penunjang Sub TP2K BPSDALH

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator kinerja program Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kelompok sasaran: Aparatur

Kegiatan yang akan dilaksanakan Pendidikan dan pelatihan formal

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator kinerja program Meningkatnya Pelayanan Komunikasi dan Fungsi Sarana Kantor

Kelompok sasaran: Aparatur

Kegiatan yang akan dilaksanakan:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
6. Pembangunan Pagar Laboratorium

7. Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup

4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator kinerja program Meningkatnya Disiplin Aparatur

Kelompok sasaran: Aparatur

Kegiatan yang akan dilaksanakan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator kinerja program Tersusunnya dan Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kelompok sasaran: Aparatur/Masyarakat

Kegiatan yang akan dilaksanakan:

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4. Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD

6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Indikator kinerja program Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan

Kelompok sasaran: Institusi Pemerintah, Swasta, Pemerhati Lingkungan, Masyarakat Adat.

Kegiatan yang akan dilaksanakan:

1. Pemantauan Kualitas Air Sungai di Provinsi Papua
2. Peningkatan Kapasitas Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua
3. Pemantauan RKL/RPL
4. Pemantauan Kualitas Udara Ambien
5. Pemberdayaan Masyarakat Adat Sadar Hukum Lingkungan
6. Pengawasan Lingkungan Hidup
7. Pembinaan Pemantauan dan Penilaian Adipura

7) Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

Indikator kinerja program Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Kelompok sasaran: Institusi Pemerintah, Pemerhati Lingkungan, Masyarakat Adat.

Kegiatan yang akan dilaksanakan:

1. Pembinaan dan Penilaian Kalpataru
2. Pemberdayaan Institusi Kemasyarakatan Dalam Penyelamatan Danau

8) Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim

Indikator kinerja program Penurunan emisi GRK dan Peningkatan Serapan GRK

Kelompok sasaran: Institusi Pemerintah, Pemerhati Lingkungan, Masyarakat Adat.

Kegiatan yang akan dilaksanakan:

1. Pengelolaan Sampah di Kab/Kota (Pilot/Project)
2. Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Adaptasi dan Mitigasi Tanaman Buah Merah di 5 Wilayah

9) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Indikator kinerja program presentase status lingkungan hidup

Kelompok sasaran: Institusi Pemerintah, Pemerhati Lingkungan, Dunia Usaha

Kegiatan yang akan dilaksanakan:

1. Pekan Lingkungan Hidup di Provinsi Papua
2. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah
3. Penyebarluasan Informasi SDA dan LH
4. Pekan Cinta Puspa dan Satwa Papua

10) Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan

Indikator kinerja program Meningkatnya Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan

Kelompok sasaran: Institusi Pemerintah, Pemerhati Lingkungan, Dunia Usaha, Masyarakat Adat

Kegiatan yang akan dilaksanakan: Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pengembangan Ekowisata

Program Pendukung untuk mencapai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur ada satu program yaitu:

Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Indikator kinerja program meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Kelompok sasaran: Institusi Pemerintah, Pemerhati Lingkungan, Dunia Usaha, Masyarakat Adat

Kegiatan yang akan dilaksanakan:

1. Pembentukan pos pengaduan LH Papua
2. Pembinaan dan Pengawasan Komisi AMDAL Kabupaten/Kota
3. Rakornis Lingkungan Hidup Provinsi Papua
4. Penilaian Dokumen LH 10 Kegiatan Wajib AMDAL
5. Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Laboratorium Lingkungan Hidup Papua
6. Pembentukan Kaukus Lingkungan Hidup Provinsi

2.2.8. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)

Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua telah menetapkan Rencana Kerja dengan indikator kinerja utama dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program dan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran.

Tabel 2.2: Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2015

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2015
1	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan	Persentase perusahaan yang taat Pengelolaan Lingkungan	8 dunia usaha
2	Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup untuk kelayakan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya	Tingkat Kualitas Udara Ambien memenuhi baku mutu	12 titik pantau
		Tingkat Kualitas Air yang memenuhi kualitas baku mutu	18 titik pantau
3	Meningkatkan upaya penataan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pelanggar aturan lingkungan atau pelaku pencemaran lingkungan hidup	Jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	3 kasus
4	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan SDA dan	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif menjaga lingkungan	33 kelompok

	lingkungan hidup melalui peran serta masyarakat adat		
5	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup	jumlah laboratorium lingkungan yang terakreditasi	1 laboratorium
		jumlah kaukus yang terbentuk	1 kaukus
6	Meningkatnya pengendalian pengelolaan LH pada dunia usaha	Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang mendapatkan ijin lingkungan	9 ijin lingkungan

2.2.9. Rencana Belanja

Pada Tahun Anggaran 2015 Badan Pengelola Lingkungan hidup Provinsi Papua menggunakan total anggaran APBD tahun 2015 sebesar Rp. 25.690.027.000,- (setelah perubahan) terdiri dari belanja langsung Rp. 15.827.143.000,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 9.233.714.912.

2.2.10. Penetapan Kinerja /Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan Anggaran atau DPA, seperti pada tabel di berikut:

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2015.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan	Persentase perusahaan yang taat Pengelolaan Lingkungan	8 dunia usaha	Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup - Pemantauan RKL/RPL - Pengawasan Lingkungan Hidup Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - Rakornis LH Provinsi Papua	299.750.000,- 304.250.000,- 923.161.610,-
2	Menurunkan beban pencemaran	Tingkat Kualitas Air yang memenuhi	18 titik pantau	Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	

	lingkungan hidup untuk kelayakan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya	kualitas baku mutu		<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan Kualitas Air Sungai di Provinsi Papua <p>Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah - Penyebarluasan informasi SDA dan LH 	204.500.000,-
		Tingkat Kualitas Udara Ambien memenuhi baku mutu	12 titik pantau	<p>Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan Kualitas Udara Ambien - Pembinaan Pemantauan dan penilaian Adipura 	279.520.000,- 312.275.000,-
3	Meningkatkan upaya penaatan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pelanggar aturan lingkungan atau pelaku pencemaran lingkungan hidup	Jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	3 kasus	<p>Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Masyarakat Adat Sadar Hukum - Pembentukan Pos Pengaduan LH Papua 	153.759.350,- 337.350.000,-
4	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup melalui peran serta masyarakat adat	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif menjaga lingkungan	56 kel	<p>Perlindungan dan Konservasi SDA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Penilaian Kalpataru - Pemberdayaan Institusi Kemasyarakatan Dalam Penyelamatan Danau <p>Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pengembangan Ekowisata <p>Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota - Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Adaptasi dan Mitigasi Tanaman Buah Merah di 5 Wilayah <p>Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekan Cinta Puspa dan Satwa - Pekan Lingkungan Hidup di Provinsi Papua 	136.050.000,- 210.000.000,- 229.650.000,- 317.750.000,- 1.088.250.000,- 178.250.000,- 473.000.000,-
5	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup	jumlah laboratorium lingkungan yang terakreditasi	1 lab	<p>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Peralatan Laboratorium <p>Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Laboratorium 	405.000.000,- 146.000.000,-

				Lingkungan - Pembentukan Kaukus Lingkungan Hidup Provinsi	597.700.000,-
7	Meningkatnya pengendalian pengelolaan LH pada dunia usaha	Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang mendapatkan ijin lingkungan	9 ijin lingkungan	Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup - Peningkatan Kapasitas Komisi Penilai Amdal Provinsi Papua Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - Pembinaan dan Pengawasan Komisi Amdal Kabupaten/Kota - Penilaian Dokumen LH 10 Kegiatan Wajib Amdal -	328.750.000,- 198.250.000,- 318.750.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2015 yang telah disepakati. Penilaian ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan melalui Renstra dan Rencana Kerja/Penetapan Kinerja.

Pelaporan akuntabilitas kinerja di tuangkan melalui evaluasi dan analisis kinerja atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua.

Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang di jumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat di nilai dan di pelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa akan datang.

Sedangkan analisis kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang di jumpai dalam pelaksanaan misi agar dapat di nilai dan di pelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Analisis di laksanakan terhadap perbedaan kinerja (Performance GAP) yang terjadi, serta penyebab untuk mencari strategi pemecahan masalah yang akan di laksanakan. Sedangkan analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam rangka mewujudkan program, tujuan, misi dan visi sebagaimana di tetapkan dalam perencanaan strategis. Pengukuran pencapaian tujuan baru dapat dilakukan setelah beberapa sasaran tahunan bersangkutan telah dicapai.

Adapun skala penilaian peringkat kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

1. Matriks Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan	% Perusahaan yang taat pengelolaan lingkungan	8 perusahaan				
			Pemantauan RKL/RPL - 6 perusahaan	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	- Pemantauan RKL/RPL - Pengawasan Lingkungan Hidup	6 perusahaan Pengawasan Lingkungan Hidup - 5 perusahaan Diklat PPLH - 2 orang Pengelolaan B3 dan Pengendali Limbah B3 - 2 orang	1,38 1 1
			Perusahaan diberi pemahaman dalam pengelolaan LH dan Program CSR dari Perusahaan - 4	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	- Rakorinis LH Provinsi Papua	Perusahaan diberi pemahaman dalam pengelolaan LH dan Program CSR dari Perusahaan - 4	1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1							110%
2	Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup untuk kelayakan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya	Tingkat Kualitas Air memenuhi Baku Mutu	18 titik pantau (temp, TDS, TSS, pH, BOD ₅ , COD, DO, NH ₃ N, Cl, F, NO ₃ N, NO ₂ N, PO ₄ P, SO ₄ , SH ₂ S, As, Fe, Cd, Cr, Mn, Hg, Pb, Cu, Zn, MBAS, M&L, Fenol, Cl ₂ , Fecal Coliform, Total Coliform)	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	- Pemantauan Kualitas Air Sungai di Provinsi Papua	18 titik pantau (temp, TDS, TSS, pH, BOD ₅ , COD, DO, NH ₃ N, Cl, F, NO ₃ N, NO ₂ N, PO ₄ P, SO ₄ , SH ₂ S, As, Fe, Cd, Cr, Mn, Hg, Pb, Cu, Zn, MBAS, M&L, Fenol, Cl ₂ , Fecal Coliform, Total Coliform)	1
					-		1
			Pelatihan SILD	Peningkatan	Penyusunan Status	Pelatihan SILD	

			<ul style="list-style-type: none"> - 3 org Prov - 29 peserta kab Pengumpul data SKPD <ul style="list-style-type: none"> - 22 Pengumpul data kab/kota <ul style="list-style-type: none"> - 6 kab Penilaian SLHD Kab <ul style="list-style-type: none"> - 29 Penyusunan SLHD Prov <ul style="list-style-type: none"> - 50 buku 	Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - 3 org Prov - 14 peserta kab Pengumpul data SKPD <ul style="list-style-type: none"> - 10 Pengumpul data kab/kota <ul style="list-style-type: none"> - 6 kab Penilaian SLHD Kab <ul style="list-style-type: none"> - 15 Penyusunan SLHD Prov <ul style="list-style-type: none"> - 50 buku 	1 0.49 0,46 1 0.52 1
							0,75
			Pengisian BeritaWebsite <ul style="list-style-type: none"> - 150 Penerbitan Buletin <ul style="list-style-type: none"> - 4 kali@ 100 eks Penerbitan Buku LH <ul style="list-style-type: none"> - 5 judul @ 100 Publikasi RRI <ul style="list-style-type: none"> - 2 kali Publikasi TV <ul style="list-style-type: none"> - 2 kali Liflet <ul style="list-style-type: none"> - 5 jenis @ 100 Baliho, umbul-umbul <ul style="list-style-type: none"> - 30 buah Kalender <ul style="list-style-type: none"> - 50 		Penyebarluasan informasi SDA dan LH	Pengisian BeritaWebsite <ul style="list-style-type: none"> - 75 Penerbitan Buletin <ul style="list-style-type: none"> - 4 kali@ 100 eks Penerbitan Buku LH <ul style="list-style-type: none"> - 4 judul @ 125 Publikasi RRI <ul style="list-style-type: none"> - 0 kali Publikasi TV <ul style="list-style-type: none"> - 2 kali Liflet <ul style="list-style-type: none"> - 5 jenis @ 100 Baliho, umbul-umbul <ul style="list-style-type: none"> - 30 buah Kalender <ul style="list-style-type: none"> - 50 	0.5 1 1 0 1 1 1
							0.82
		Tingkat Kualitas Udara Ambien memenuhi Baku Mutu	12 titik pantau (sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, oxidant (ozon), dust partikulat, lead (Pb), non metan hidrokarbon (NMHC))	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	- Pemantauan Kualitas Udara Ambien	12 titik pantau (sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, oxidant (ozon), dust partikulat, lead (Pb), non metan hidrokarbon (NMHC))	1
					-		1
			Pelaksanaan, Pembinaan dan pemantauan		- Pembinaan Pemantauan dan	Pelaksanaan, Pembinaan dan pemantauan	

			ADIPURA - 8 kab Penilaian ADIPURA - 8 kab		Penilaian ADIPURA	ADIPURA - 8 kab Penilaian ADIPURA - 6 kab	1 0,75
					-		0.88
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2							89%
3	Meningkatkan upaya penataan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pelanggaran aturan lingkungan atau pelaku pencemaran lingkungan hidup	Jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	3 kasus	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		8 kasus yang di tangani dan 2 kasus sudah dijawab dengan surat Gubernur Papua (SK Gub. No. 188.4/292/2015 tanggal 16 September 2015) 1 telah diverifikasi oleh PPNS	1
			2		Pemberdayaan Masyarakat Adat Sadar Hukum Lingkungan	2	1
			6 pos pengaduan		Pembentukan Pos Pengaduan LH Papua	6	1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3							100%
4	Peningkatan ekonomi masyarakat adat berbasis potensi SDA dan lingkungan hidup	jumlah kelompok masyarakat yang aktif menjaga kelompok	33 kelompok				
			Pembinaan - 2 Penilaian - 2	Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	Pembinaan dan Penilaian Kalpataru	Pembinaan - 2 Penilaian - 0	0.5
			Kelompok Masyarakat - 4		Pemberdayaan Institusi kemasyarakatan dalam penyelamatan Danau	Kelompok Masyarakat - 4	1
							0.75
			Kelompok Masyarakat - 4 Leaflet - 200 Papan ekowisata	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut	Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pengembangan Ekowisata	Kelompok Masyarakat - 4 Leaflet - 200 Papan ekowisata	1

			- 4	dan Hutan		- 4	
							1
			Kelompok Masyarakat - 4	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pekan Cinta Puspa dan Satwa	Kelompok Masyarakat - 4	1
			Peserta lomba - 400		Pekan Lingkungan Hidup di Provinsi Papua	Peserta lomba - 400	1
							1
			Kelompok Masyarakat - 3 Alat 3 R - 21 Komposter - 21 Takakura - 21 Tempat Sampah 3 R	Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	Pengelolaan Sampah d Kabupaten/Kota	Kelompok Masyarakat - 3 Alat 3 R - 21 Komposter - 21 Takakura - 21 Tempat Sampah 3 R	1
			Kelompok Masyarakat - 7 kel buah merah - 5 kel Mangrove - 2 kel sagu - 2 kel kehati		Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Adaptasi dan Mitigasi Tanaman Buah Merah di 5 Wilayah	Kelompok Masyarakat - 7 kel buah merah - 5 kel Mangrove - 2 kel sagu - 2 kel kehati	1
							1
	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4						94%
5	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup	Jumlah laboratorium lingkungan yang terakreditasi	Laboratorium Lingkungan terakreditasi Prov. Papua dan 1 Kaukus Lingkungan		-		
			Alat Laboratorium - Alat pengukur emisi gas buang solar 1 unit - Aqua destilator - pH Meter	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pengadaan Peralatan Laboratorium	Alat Laboratorium - Alat pengukur emisi gas buang solar 1 unit - Aqua destilator - pH Meter	1

			Naskah Akademik - 1 dokumen Draf Raperda Lab LH - 1 dokumen	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Laboratorium Lingkungan	Naskah Akademik - 0 dokumen Draf Raperda Lab LH - 0 dokumen	0 0
			Pembentukan Kaukus - 0		- Pembentukan Kaukus Lingkungan Hidup Provinsi	Pembentukan Kaukus - 0 Bimtek bagi Anggota DPRP - 10 orang	0 1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5							40%
6	Meningkatnya pengendalian pengelolaan LH pada dunia usaha	Jumlah perusahaan wajib Amdal yang mendapat ijin lingkungan	9 ijin lingkungan				
			200 orang masyarakat adat	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kapasitas Komisi Penilai Amdal Provinsi Papua	100	0.5
			5 KPA Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pembinaan dan Pengawasan Komisi AMDAL Kabupaten/Kota	5 KPA Kabupaten/Kota	1
			8 ijin dan 23 rekomendasi DELH		Penilaian Dokumen LH 10 Kegiatan Wajib AMDAL	8 ijin dan 23 rekomendasi DELH	1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6							0,84
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6							84%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis							86,17%

3.2. Evaluasi Kinerja

Analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator input, output dan outcome antara rencana kinerja (Performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance Result) yang dicapai Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua, kemudian di analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (Performance GAP) karena adanya perbedaan antara realisasi dengan yang direncanakan.

Tingkat capaian kinerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2015 digambarkan dengan tingkat pencapaian indikator kinerja program sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2015 sebagai berikut:

- a) Capaian Kinerja Sasaran Strategis I yaitu meningkatnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan pencapaiannya adalah 110% dari total indikator. Ini berarti Pengawasan pada 11 perusahaan telah dilaksanakan dengan baik namun karena keterbatasan dana masih ada 60 perusahaan wajib AMDAL disamping itu sangat terbatasnya tenaga PPLH yang terbatas dari 4 orang PPLHD telah mutasi 1 orang ke SKPD lain.
- b) Capaian Kinerja Sasaran Strategis II yaitu Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup untuk kelayakan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya adalah 89% ini berarti penurunan beban pencemar di Provinsi Papua sudah cukup baik namun belum mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua sehingga diperlukan pengawasan yang ketat lagi yang melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Papua.
- c) Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Meningkatkan upaya penataan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pelanggar aturan lingkungan atau pelaku pencemaran lingkungan hidup adalah mencapai 100%. Namun perlu dilakukan penegakan hukum kepada para pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan.
- d) Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV adalah 94% yang berarti bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adat yang berbasis pada potensi SDA dan lingkungan hidup telah dilaksanakan dengan baik, namun masih dana yang terbatas. Diharapkan pada tahun depan pemberdayaan masyarakat terus ditingkatkan lagi untuk menjaga kelestarian lingkungan berbasis masyarakat adat.
- e) Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup V adalah 40%. Ada 1 indikator yang dilaksanakan dengan baik

mencapai 100% namun ada 2 indikator yang tidak tercapai hal ini disebabkan karena tidak ada koordinasi yang baik antara pihak terkait.

- f) Capaian Kinerja Sasaran Strategis VI Meningkatnya pengendalian pengelolaan LH pada dunia usaha adalah 84% ini berarti proses untuk mendapatkan ijin lingkungan telah dilakukan secara komprehensif dan konsisten dan terus menerus dilakukan peningkatan kapasitas bagi tim penilai AMDAL Provinsi.

Secara keseluruhan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup yang ditargetkan pada tahun 2015 mencapai 86,17%, walaupun Capaian Kinerja Sasaran Strategis tinggi namun capaian kinerja sasaran strategis untuk capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup masih **sangat rendah** sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam koordinasi dengan pihak terkait, disamping itu diperlukan keseriusan dari semua pihak untuk menjaga lingkungan hidup karena dana yang tersedia sangat terbatas dalam pengelolaan lingkungan hidup.

3.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung Tahun 2015 sebesar Rp. 23.898.256.379 atau (93,03%) dan realisasi belanja langsung sebesar Rp.14.6164.541.467,- atau (92,65%) dan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 9.233.714.912 atau (93,62%) sebagaimana pada table dibawah ini:

Tabel 2.4
Pagu Pelaksanaan APBD Provinsi Papua Disusun Per Jenis Tahun Anggaran 2015

No	Jenis Belanja (Rp.)	Pagu Dana (Rp.)
(1)	(2)	(2)
1.	Belanja Tidak langsung	Rp. 9.862.884.000,-
2.	Belanja Langsung	Rp. 15.827.143.000,-
	a. Belanja Pegawai	Rp. 780.399.350,-
	b. Belanja Barang/Jasa	Rp. 10.873.208.617,-
	c. Belanja Modal	Rp. 3.010.933.500,-

Tabel 2.5:
Realisasi Pelaksanaan APBD Provinsi Papua Disusun Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2015

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi		
			Keuangan (Rp.)	%	Fisik %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Belanja Tidak Langsung	9.862.884.000,-	9.233.714.912,-	93,62	93,62
2.	Belanja Langsung	15.827.143.000,-	14.664.541.467,-	92,65	95,47
	Jumlah	25.690.027.000,-	23.898.256.379,-	93,03	94,76

Dengan Perincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2015

(1) Belanja Pegawai

Pagu Dana	:	Rp. 9.862.884.000,-
Realisasi Keuangan.....	:	93,62%
Realisasi Fisik.....	:	93,62%
Realisasi Keuangan (SPJ).....	:	Rp.9.233.714.912,-

2. Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pagu Dana.....	:	Rp. 468.600.000,-
Realisasi Keuangan.....	:	93,38 %
Realisasi Fisik.....	:	100%
Realisasi Keuangan (SPJ).....	:	Rp. 437.588.000,-

(2) Penyediaan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik

Pagu Dana.....	:	Rp. 296.000.000,-
Realisasi Keuangan.....	:	99,97 %
Realisasi Fisik.....	:	100 %
Realisasi Keuangan (SPJ).....	:	Rp.295.916.606,-

(3) Penyediaan Alat tulis Kantor

Pagu Dana.....	:	Rp. 331.453.200,-
Realisasi Keuangan.....	:	99,94 %
Realisasi Fisik.....	:	100 %
Realisasi Keuangan (SPJ).....	:	Rp. 331.261.510,-

(4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pagu Dana.....	:	Rp. 324.217.840,-
Realisasi Keuangan.....	:	99,99%
Realisasi Fisik.....	:	100 %
Realisasi Keuangan (SPJ).....	:	Rp. 324.199.950,-

(5) Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Pagu Dana.....	:	Rp. 215.000.000,-
Realisasi Keuangan.....	:	95,20%
Realisasi Fisik.....	:	100 %
Realisasi Keuangan (SPJ).....	:	Rp. 204.675.302,-

- (6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peundang-undangan
 Pagu Dana..... : Rp. 40.760.000,-
 Realisasi Keuangan..... : 97,40 %
 Realisasi Fisik..... : 100%
 Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 39.700.000,-
- (7) Penyediaan Makanan dan Minuman
 Pagu Dana..... : Rp. 150.500.000,-
 Realisasi Keuangan..... : 99,95 %
 Realisasi Fisik..... : 100%
 Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 150.429.700,-
- (8) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 Pagu Dana..... : Rp. 1.021.150.000,-
 Realisasi Keuangan..... : 99,60 %
 Realisasi Fisik..... : 100%
 Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 1.017.108.500,-
- (9) Penunjang Sub TP2K BPLH Provinsi Papua
 Pagu Dana..... : Rp. 90.000.000,-
 Realisasi Keuangan..... : 100 %
 Realisasi Fisik..... : 100%
 Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 90.000.000,-

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- (1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 Pagu Dana..... : Rp. 775.000.000,-
 Realisasi Keuangan..... : 98,68 %
 Realisasi Fisik..... : 100%
 Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 764.759.500,-
- (2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 Pagu Dana..... : Rp. 512.401.000,-
 Realisasi Keuangan..... : 99,36 %
 Realisasi Fisik..... : 100%
 Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 512.000.000,-
- (3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 Pagu Dana..... : Rp. 90.045.000,-
 Realisasi Keuangan..... : 99,78 %
 Realisasi Fisik..... : 100%
 Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 89.850.000,-
- (4) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
 Pagu Dana..... : Rp. 481.000.000,-
 Realisasi Keuangan..... : 100 %
 Realisasi Fisik..... : 100%
 Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 480.996.989,-

- (5) Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
 Pagu Dana..... : Rp. 248.000.000,-
 Realisasi Keuangan..... : 99,77 %
 Realisasi Fisik..... : 100%
 Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 247.435.000,-
- (6) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 Pagu Dana..... : Rp. 255.000.000,-
 Realisasi Keuangan..... : 90,08 %
 Realisasi Fisik..... : 100%
 Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 229.700.000,-
- (7) Pembangunan Pagar Laboratorium
 Pagu Dana..... : Rp. 1.559.250.000,-
 Realisasi Keuangan..... : 70,87 %
 Realisasi Fisik..... : 83,91%
 Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 1.105.016.000,-
- (8) Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup
 Pagu Dana..... : Rp. 405.000.000,-
 Realisasi Keuangan..... : 99,63 %
 Realisasi Fisik..... : 100%
 Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 403.500.000,-
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- (1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
 Pagu Dana..... : Rp. 89.100.000,-
 Realisasi Keuangan..... : 100 %
 Realisasi Fisik..... : 100%
 Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 89.100.000,-
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- (1) Pendidikan dan pelatihan Formal
 Pagu Dana..... : Rp. 420.000.000,-
 Realisasi Keuangan..... : 998,69%
 Realisasi Fisik..... : 100%
 Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 414.497.300,-
- e. Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
- (1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 Pagu Dana..... : Rp. 30.000.000,-
 Realisasi Keuangan..... : 100 %
 Realisasi Fisik..... : 100%
 Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 30.000.000,-

- (2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester
 - Pagu Dana..... : Rp 15.000.000,-
 - Realisasi Keuangan..... : 100 %
 - Realisasi Fisik..... : 100%
 - Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 15.000.000,-

- (3) Penyusunan Renja,RKA dan Perubahan APBD
 - Pagu Dana..... : Rp. 40.000.000,-
 - Realisasi Keuangan..... : 100 %
 - Realisasi Fisik..... : 100%
 - Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 40.000.000,-

- (4) Penyediaan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - Pagu Dana..... : Rp. 30.000.000,-
 - Realisasi Keuangan..... : 100 %
 - Realisasi Fisik..... : 100%
 - Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 30.000.000,-

f. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

- (1) Pemantauan Kualitas Air Sungai di Provinsi Papua
 - Pagu Dana..... : Rp. 204.500.000,-
 - Realisasi Keuangan..... : 92,45 %
 - Realisasi Fisik..... : 100%
 - Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 189.063.800,-

- (2) Peningkatan Kapasitas Komisi Penilai Amdal Provinsi Papua
 - Pagu Dana..... : Rp. 328.750.000,-
 - Realisasi Keuangan..... : 96,10 %
 - Realisasi Fisik..... : 100%
 - Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 315.916.700,-

- (3) Pemantauan RKL/RPL
 - Pagu Dana..... : Rp. 299.750.000,-
 - Realisasi Keuangan..... : 63,63%
 - Realisasi Fisik..... : 63,77%
 - Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 190.727.200,-

- (4) Pemantauan Kualitas Udara Ambien
 - Pagu Dana..... : Rp. 560.100.000,-
 - Realisasi Keuangan..... : 96,39 %
 - Realisasi Fisik..... : 100%
 - Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 539.839.900,-

- (5) Pemberdayaan Masyarakat Adat Sadar Hukum Lingkungan
 Pagu Dana..... : Rp. 153.759.350,-
 Realisasi Keuangan..... : 56,10 %
 Realisasi Fisik..... : 60,98%
 Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 86.259.350,-
- (6) Pengawasan Lingkungan Hidup
 Pagu Dana..... : Rp. 304.250.000,-
 Realisasi Keuangan..... : 89,91 %
 Realisasi Fisik..... : 90,07%
 Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 273.564.000,-
- (7) Pembinaan Pemantauan dan Penilaian Adipura
 Pagu Dana..... : Rp. 342.600.000,-
 Realisasi Keuangan..... : 94,86%
 Realisasi Fisik..... : 100%
 Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 325.003.000,-
- g. Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam
- (1) Pembinaan dan Penilaian Kalpataru
 Pagu Dana..... : Rp. 136.050.000,-
 Realisasi Keuangan..... : 97,82%
 Realisasi Fisik..... : 100%
 Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 133.080.000,-
- (2) Pemberdayaan Institusi Kemasyarakatan Dalam Penyelamatan Danau
 Pagu Dana..... : Rp. 210.000.000,-
 Realisasi Keuangan..... : 97,02%
 Realisasi Fisik..... : 100%
 Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 203.750.000,-
- h. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH
- (1) Pekan Lingkungan Hidup di Provinsi Papua
 Pagu Dana..... : Rp. 473.000.000,-
 Realisasi Keuangan..... : 99,85%
 Realisasi Fisik..... : 100%
 Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp 465.672.900,-
- (2) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah
 Pagu Dana..... : Rp. 279.520.000,-
 Realisasi Keuangan..... : 95,31%
 Realisasi Fisik..... : 100%
 Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 266.410.000,-

- (3) Penyebarluasan Informasi SDA dan LH
 - Pagu Dana..... : Rp. 312.275.000,-
 - Realisasi Keuangan..... : 90,04%
 - Realisasi Fisik..... : 90,754%
 - Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 281.186.950,-

- (4) Pekan Cinta Puspa dan Satwa Papua
 - Pagu Dana..... : Rp. 178.250.000,-
 - Realisasi Keuangan..... : 97,03%
 - Realisasi Fisik..... : 100%
 - Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 172.960.100,-

i. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pengembangan Ekowisata
 - Pagu Dana..... : Rp. 229.650.000,-
 - Realisasi Keuangan..... : 98,04%
 - Realisasi Fisik..... : 100%
 - Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 225.150.000,-

j. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH

- (1) Pembentukan Pos Pengaduan LH Papua
 - Pagu Dana..... : Rp. 337.350.000,-
 - Realisasi Keuangan..... : 95,38%
 - Realisasi Fisik..... : 100%
 - Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 321.750.900,-

- (2) Pembinaan dan Pengawasan Komisi AMDAL Kabupaten/Kota
 - Pagu Dana..... : Rp. 198.250.000,-
 - Realisasi Keuangan..... : 71,82%
 - Realisasi Fisik..... : 72,16%
 - Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 142.384.400,-

- (3) Rakoornis Lingkungan Hidup Provinsi Papua
 - Pagu Dana..... : Rp. 923.161.610,-
 - Realisasi Keuangan..... : 97,60%
 - Realisasi Fisik..... : 100%
 - Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 900.960.900,-

- (4) Penilaian Dokumen LH 10 Kegiatan Wajib AMDAL
 - Pagu Dana..... : Rp. 318.750.000,-
 - Realisasi Keuangan..... : 90,62%
 - Realisasi Fisik..... : 90,75%
 - Realisasi Keuangan (SPJ)..... : Rp. 288.844.510,-

- (5) Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Laboratorium Lingkungan Hidup Papua
- | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|
| Pagu Dana..... | : | Rp. 146.000.000,- |
| Realisasi Keuangan..... | : | 31,51% |
| Realisasi Fisik..... | : | 31,51% |
| Realisasi Keuangan (SPJ)..... | : | Rp. 46.000.000,- |
- (6) Pembentukan Kaukus Lingkungan Hidup Papua
- | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|
| Pagu Dana..... | : | Rp. 597.700.000,- |
| Realisasi Keuangan..... | : | 95,15% |
| Realisasi Fisik..... | : | 95,44% |
| Realisasi Keuangan (SPJ)..... | : | Rp. 568.700.000,- |

i. Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim

- (1) Pengelolaan Sampah di Kab/Kota (Pilot Project)
- | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|
| Pagu Dana..... | : | Rp. 317.750.000,- |
| Realisasi Keuangan..... | : | 99,41% |
| Realisasi Fisik..... | : | 100% |
| Realisasi Keuangan (SPJ)..... | : | Rp. 315.871.000,- |
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Adaptasi dan Mitigasi Tanaman Buah Merah di 5 Wilayah
- | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|
| Pagu Dana..... | : | Rp. 1.088.250.000,- |
| Realisasi Keuangan..... | : | 98,20% |
| Realisasi Fisik..... | : | 100% |
| Realisasi Keuangan (SPJ)..... | : | Rp. 1.068.675.500,- |

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2015, serta Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal penting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran dan tujuan instansi sebagai jabaran visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan kegiatan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2015 merupakan tahun ke-2 (dua) dari Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2014-2018. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Pencapaian Kinerja berupa Pelaksanaan Kegiatan ini disusun dan dilaksanakan berdasarkan rencana Kinerja 2015 yang acuan pada Rencana Strategis 2013 – 2018 Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran maka diperlukan strategi untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Papua melalui peningkatan kapasitas aparatur terutama bagi PPLHD dan PPNS Lingkungan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas, karena BPLH Provinsi Papua baru memiliki 3 (tiga) tenaga PPLHD dan 5 (lima) PPNS Lingkungan.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui pemantauan dan pengawasan dunia usaha, dengan mengembangkan laboratorium lingkungan yang kompeten dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat dalam menjaga hutan dan lingkungan sebagai paru-paru dunia.
4. Membangun kemitraan dengan Legislatif melalui kaukus Parlemen Papua.

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.

Secara keseluruhan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua tidak terlepas dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi dan pihak ketiga dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua dalam tahun 2015 melaksanakan 11 (Sebelas) Program yang terdiri dari 7 Indikator Outcome sesuai dengan rencana kinerja tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 disampaikan semoga dengan tersusunnya LAKIP Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2015 dapat menjadi acuan dalam perbaikan-perbaikan pada penyusunan LAKIP Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua selanjutnya.